

SEKILAS APBN

Budget Issues Quick Response

SERAPAN ANGGARAN “SEDIKIT”, APA ARTINYA UNTUK KETAHANAN PANGAN?

Marihot Nasution

Dalam konferensi pers APBN Kita Edisi Oktober 2022 disampaikan bahwa serapan anggaran ketahanan pangan baru mencapai 40,7 persen per September 2022. Hal ini terjadi di tengah bayangan krisis pangan akibat perang antara Rusia dan Ukraina yang dikhawatirkan akan memicu gerak inflasi, lantaran distribusi komoditas terhambat. Penyerapan anggaran ketahanan pangan tersebut direalisasikan oleh: Kementan sebesar Rp9,85 triliun; Kemen PUPR sebesar Rp2,76 triliun; dan KKP sebesar Rp1,60 triliun. Dilaporkan juga bahwa alokasi tertinggi tercatat pada bidang jalan senilai Rp2,70 triliun dan terendah pada bidang perdagangan Rp50 miliar. Di tahun 2022 ini, pembangunan ketahanan pangan dialokasikan anggaran sebesar Rp94,1 triliun dalam outlook APBN. Selama ini, anggaran ketahanan pangan dialokasikan melalui belanja kementerian/lembaga (K/L), belanja non K/L, maupun Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD). Dalam belanja K/L, anggaran tersebar pada Kementan dan KKP yang memiliki tugas pokok meningkatkan produktivitas pangan di sektor pertanian dan perikanan, serta Kemen PUPR yang berfokus pada pembangunan infrastruktur pertanian (irigasi dan waduk/bendungan). Sementara itu, belanja non K/L meliputi penyaluran subsidi pupuk, subsidi bunga kredit, resi gudang, dan antisipasi atas stok beras pemerintah dan stabilisasi harga pangan. Anggaran ketahanan pangan dalam TKDD dialokasikan melalui: Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tematik Pengembangan Food Estate dan Tematik Penguatan Kawasan Sentra Produksi (Pertanian, Perikanan dan Hewani); DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP); dan Dana Desa (DD) yang dialokasikan pada berbagai upaya ketahanan pangan termasuk pembangunan lumbung pangan desa. Pola penganggaran dalam ketahanan pangan tersebut telah berlangsung sejak 2014 hingga kini.



Anggaran Ketahanan Pangan Indonesia dan Capaian Global Food Security Index



Dampak dari alokasi anggaran dengan pola tersebut bagi ketahanan pangan Indonesia dapat dilihat dari Global Food Security Index (GFSI). The Economist merilis angka GFSI Indonesia di tahun 2022 ini adalah sebesar 60,2. Selama pengukuran GFSI sejak 2012, kinerja Indonesia hanya sedikit meningkat. Skor untuk indikator kualitas dan keamanan (quality and safety) justru menurun sejak 2012. Hal ini dapat diartikan bahwa diperlukan penyediaan makanan yang lebih aman dan berkualitas lebih tinggi kepada penduduk dengan meningkatkan keragaman makanan dan mengembangkan standar dan pedoman gizi di seluruh negeri. Dalam laporan ini disampaikan bahwa Indonesia sangat baik dalam mendukung infrastruktur pertanian dan mengatasi volatilitas yang terkait dengan produksi pertanian dan biaya pangan, memungkinkan penyediaan pangan yang terjangkau dengan harga yang stabil. Namun, untuk memajukan lingkungan ketahanan pangan di dalam negeri, Indonesia perlu memperkuat komitmen politiknya terhadap adaptasi untuk memastikan produksi pertanian minimal terpengaruh oleh risiko terkait iklim. Ini juga akan membantu negara untuk memastikan kecukupan pasokan di tahun-tahun mendatang. Selain itu, Indonesia harus meningkatkan kualitas pangan dengan meningkatkan keragaman pangan dan standar gizi.